

Ini Cara Pemrov Banten Kendalikan Inflasi

SERANG (IM)- Pemerintah Provinsi Banten selama tahun 2022 dapat menekan inflasi dengan melakukan berbagai kegiatan, seperti operasi pasar hingga membuat gerakan tanam pangan cepat panen. Berdasarkan data BPS, inflasi tahun ke tahun (year on year/ yoy) pada Desember 2022 Provinsi Banten sebesar 4,56 persen. Angka ini membuat Provinsi Banten berada pada peringkat lima daerah terendah inflasi dan angka itu lebih rendah dibandingkan inflasi secara nasional 5,51 persen. Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, pengendalian inflasi di daerahnya yang telah dilakukan selama setahun berkat kerjasama semua pihak dengan berbagai upaya. Beberapa upaya yang dilakukan Pemrov Banten dalam menekan inflasi di antaranya melaksanakan operasi pasar murah sebanyak 85 kali dari bulan Maret hingga Desember 2022.

"Dalam menekan angka inflasi, sebagai kegiatan rutin bagi masyarakat, kita melakukan operasi pasar murah secara terus menerus yang disinergikan dengan program perlindungan sosial, penurunan stunting dan usaha ekonomi produktif," kata Al Muktabar melalui keterangannya. Selasa (10/1).

Selain mengadakan pasar murah, Pemrov bersama stakeholder juga melaksanakan sidak ke pasar-pasar secara intens hingga melakukan pengawasan ke distributor agar tidak terjadi penimbunan barang. "Di samping sidak ke pasar-pasar tradisional, kita juga mengaksres ke distributornya sehingga stok dan harga barang bisa kita pantau," ujar dia.

Mantan Sekda Banten itu menjelaskan, upaya konkret pengendalian inflasi di wilayahnya juga dengan mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mampu menyediakan sumber bahan pokok yang dibutuhkan. Selain itu, Pemrov Banten melakukan kolaborasi dengan Tim Penggerak PKK dan jaringan melalui kegiatan organisasinya hingga ke taraf rumah tangga. Salah satunya, lanjut Al Muktabar, kolaborasi gerakan tanam pangan cepat panen yang dimaksudkan agar keluarga bisa mencukupi kebutuhan dalam ketahanan pangan.

Kemudian, merencanakan dana Biaya Tidak Terduga (BTI) yang dialokasikan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Banten melalui perlindungan sosial seperti bantuan usaha. ● pra

15 Rumah Warga Baduy Rusak Diterjang Angin Kencang

LEBAK (IM)- Sebanyak 15 rumah warga suku adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak dilaporkan rusak. Belasan rumah itu rusak akibat diterjang angin kencang pada Senin (9/1). "Ya betul, kejadiannya kemarin siang. Ada 15 rumah warga rusak," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak, Rohendi, Selasa (10/1).

Kata Rohendi, ke 15 rumah warga adat itu rusak pada bagian atap yang terbuat dari anyaman daun alias hateup. "Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya rusak ringan saja. Kita juga sudah kirimkan bantuan kedaruratan bencana kepada para korban," ucapnya.

Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama menyampaikan bahwa Kecamatan Leuwidamar masuk ke zona rawan angin kencang maupun puting beliung bersamaan dengan 11 Kecamatan lainnya di Lebak. "Hampir semua daerah di

Lebak ini masuk kedalam zona rawan angin kencang, untuk itu kita minta kepada warga untuk waspada, terlebih mengingat kondisi cuaca saat ini yang sudah masuk ke musim penghujan," kata Febby.

Febby pun mengimbau kepada warga khususnya yang berada di 12 Kecamatan itu untuk selalu waspada jika terjadi angin kencang. Apalagi jika di sekitar rumah terdapat pohon besar. Jika memungkinkannya, Febby meminta kepada warga untuk menebang pohon itu khawatir dapat roboh dan menimpa rumah. "Kita imbau kepada warga di 12 kecamatan itu untuk berhati-hati. Jika ada pohon besar di sekitar rumah, kalau bisa ditebang. Karena dikhawatirkan dapat roboh dan menimpa rumah jika diterjang angin kencang," katanya.

"Imbauan ini juga berlaku bagi para pengendara, bahwa jika terjadi hujan deras jangan berteduh di bawah pohon. Karena dikhawatirkan dapat roboh," pungkasnya. ● pra



IDN/ANTARA

TNI SALURKAN BANTUAN KORBAN BANJIR KUDUS

Kepala Staf Kodam (Kasdam) IV/Diponegoro Brigjen TNI Deddy Suryadi (tengah) memberikan bantuan kepada pengungsi di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (10/1). Komando Daerah Militer IV/Diponegoro menyalurkan bantuan berupa makanan, minuman hingga sembako untuk meringankan beban warga korban banjir yang melanda wilayah setempat sejak sepekan terakhir.

UMK 2023 Resmi Berlaku, Disnakertrans Banten Kerahkan 70 Pengawas

Perusahaan diminta untuk melaksanakan kewajibannya menaikkan gaji karyawan sesuai UMK yang ditetapkan. Untuk memastikan semua perusahaan di Banten mematuhi keputusan gubernur, Disnakertrans Provinsi Banten, mengerahkan 70 pengawas ketenagakerjaan turun ke lapangan.

SERANG (IM)- Pemprov Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengerahkan 70 pengawas ketenagakerjaan, untuk memastikan semua perusahaan di Banten mematuhi Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.318-Huk/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023. Menurut Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi, mulai 1 Januari 2023 UMK

baru yang telah ditetapkan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar pada 7 Desember 2022 lalu resmi berlaku. Perusahaan bakal mendapat sanksi apabila tidak mematuhi Keputusan Gubernur tentang UMK 2023 tersebut. "Sejak ditetapkan Pj Gubernur, kami telah melakukan sosialisasi melalui surat edaran terkait pembayaran UMK tahun 2023. Jadi semua perusahaan di Banten harus mematuhi keputusan gubernur," kata Septo kepada wartawan

di Kota Serang, Selasa (10/1).

Untuk memastikan semua perusahaan di Banten mematuhi keputusan gubernur, lanjut Septo, pihaknya mengerahkan 70 pengawas ketenagakerjaan untuk turun ke lapangan.

"Disnakertrans Banten tahun ini tidak membuka posko pengaduan penerapan UMK 2023, jadi semua perusahaan diawasi langsung oleh pengawas bekerjasama dengan Disnaker kabupaten/kota," tuturnya.

Besaran UMK 2023 yang telah ditetapkan, tambah Septo, merupakan upah minimum sehingga perusahaan tidak boleh membayar upah lebih rendah dari UMK 2023 yang berlaku. Kecuali pelaku usaha mikro dan kecil yang berdasarkan kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja.

"Apabila ada perusahaan tidak mematuhi UMK 2023 yang ditetapkan, maka ada sanksi kepada perusahaan yang melanggar. Hal tersebut sesuai

dengan aturan perundang-undangan," tegasnya.

Terkait penagguhan UMK 2023, Septo menegaskan bahwa Kepmenaker Nomor 231 Tahun 2003 sebagai dasar penagguhan upah sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Permenaker Nomor 23 Tahun 2021. Sehingga tidak ada lagi perusahaan yang diizinkan Pemprov Banten menagguhkan UMK.

"Adanya Keputusan Gubernur Banten tentang UMK 2023, maka perusahaan diminta untuk melaksanakan kewajibannya menaikkan gaji karyawan sesuai UMK yang ditetapkan. Sekarang sudah tidak ada penagguhan," pungkasnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Banten Tahun 2023. UMK 2023 di Provinsi Banten berada pada rentang Rp 2.944.665 (Kabupaten Lebak) hingga Rp 4.657.222 (Kota

Cilegon). Keputusan Gubernur Banten ini berlaku mulai 1 Januari 2023.

Dalam lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.318-Huk/2022 tentang UMK 2023, Al Muktabar menetapkan kenaikan UMK di Provinsi Banten berada pada kisaran 6,17 persen hingga 7,30 persen. Kenaikan tertinggi di Kota Cilegon sebesar 7,30 persen dari Rp4.340.254 di Tahun 2022 menjadi Rp4.657.222 di tahun 2023. Kenaikan terendah di Kabupaten Lebak sebesar 6,17 persen dari Rp2.773.590 menjadi Rp 2.944.665.

Berikut besaran UMK 2023 di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak Rp2.944.665,46; Kabupaten Pandeglang Rp2.980.351,46; Kota Serang Rp 4.090.799,01.

Berikutnya Kabupaten Serang Rp4.492.961,28; Kabupaten Tangerang Rp4.527.688,52; Kota Tangerang Rp4.584.519,08; Kota Tangerang Selatan Rp4.551.451,70; dan Kota Cilegon Rp 4.657.222,94. ● pra

SUDAH 2 MINGGU BELUM DIPERBAIKI

Membahayakan, Warga Keluhkan Kabel Semrawut di Ciputat

TANGSEL (IM)- Kabel semrawut masih menjadi salah satu permasalahan di daerah penyanga ibu kota, Tangerang Selatan. Pemandangan kabel acak-acakan itu terlihat di sepanjang Jalan Merpati 1, Ciputat, Tangsel pada Selasa (10/1).

Tak hanya kabel fiber optik yang menjuntai, kabel listrik juga terlihat hampir menyentuh tanah. Warga sekitar mengaku khawatir karena menganggap bahwa kabel tersebut sangat membahayakan. Alo (50), misalnya. Ia menilai kabel tersebut harus segera diperbaiki oleh Pemerintah Kota Tangsel agar warga yang tinggal di daerah tersebut tidak merasa terganggu.

"Ini membahayakan orang, jadi ini kabel listrik sejak dua minggu lalu belum diperbaiki," kata Alo saat ditemui di lokasi, Selasa.

Hal senada juga disampaikan Sayid (32). Menurutnya, kabel semrawut itu terjadi imbas dari pembuatan drainase yang dilakukan sekitar sebulan

lalu. Para pekerja galian yang dianggap belum menyelesaikan pembuatan drainase, malah menimbulkan masalah baru bagi warga sekitar. Munculnya lubang galian membuat warga semakin resah dengan kondisi tata kota di Tangsel.

Jalan dengan lebar sekitar empat meter itu jadi semakin macet. Sejumlah mobil bahkan disebut pernah terperosok ke dalam lubang galian beberapa waktu lalu.

Karena itu, sejak sepekan terakhir, warga sekitar akhirnya berinisiatif untuk menutup lubang galian agar lalu lintas di lokasi kembali lancar. "Semrawutnya sudah lama sekitar satu bulan yang lalu. Penggalian kemarin enggak ditutup sama petugasnya, malah kita yang nutup. Sama warga ditutup, kan bikin macet," jelas Sayid. "Pakai batu tanah lagi (ditutup), inisiatif warga saja karena menyebabkan macet. Kecil banget muat dua mobil. Pas ini masih berlabang enggak

muat, justru banyak terperosok ban mobil sampe didorong orang (biar keluar)," lanjut dia.

Sudah lebih dari lima tahun Sayid tinggal di daerah tersebut. Akan tetapi, ia belum merasakan perubahan signifikan dari pemerintah setempat. Ia pun berharap agar pemkot lebih memperhatikan lagi nasib warganya. Terlebih daerah tersebut sering dijadikan jalan alternatif bagi warga yang hendak melintas dari arah Bintaro menuju Ciputat atau Pamulang.

"Dari pemkot harus lebih memperhatikan jalan, apalagi ada perbaikan drainase, harus diperhatikan jalan juga. Jangan cuek, karena jalan di sini jarang ada perhatian, padahal ini jalan alternatif keluar tol Pondok Aren-Bintaro mau ke Pamulang lewat sini," kata Sayid.

"Enggak pernah diperhatikan sudah lima tahun ke belakang. Enggak ada perubahan, saya tinggal di sini sudah lima tahun," lanjut dia. ● pp

Perpustakaan Daerah Cilegon akan Dibangun Dekat Mall

CILEGON (IM) - Pemkot Cilegon melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah akan membangun perpustakaan daerah. Lokasi dibangunnya perpustakaan berada tepat di samping Cilegon Center Mall (CCM) di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Ismatullah menjelaskan, gedung perpustakaan akan dibangun di atas lahan 3.969 meter persegi. Pembebasan lahan sudah selesai dilakukan di akhir tahun 2022 lalu dengan menelan anggaran sekitar Rp10,5 miliar.

"Sebuah kota atau kabupaten yang penduduknya di bawah 500 ribu ada aturan perpustakaan harus berada pada lahan 4 ribu meter. Ini menjadi dasar berfikir kita untuk meningkatkan sarana prasarana perpustakaan yang kita miliki. 4 ribu meter itu kan satu lantai, kalau belinya 1000 meter, makan dibangun empat lantai," papar Ismat, Selasa (10/1).

Ismat menyebut lahan tersebut sangat representatif karena mudah dijangkau oleh masyarakat.

Untuk membangun gedung perpustakaan, pihaknya saat ini sedang mengajukan permohonan bantuan kepada Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

Karena Perpusnas memiliki program bantuan untuk pembangunan perpustakaan bagi kabupaten kota yang belum memiliki perpustakaan yang representatif. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah akan berupaya membangun perpustakaan yang representatif dan mampu menarik minat masyarakat untuk membaca buku.

Selain membangun gedung, serangkaian program pun sudah disiapkan untuk meningkatkan tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan. "Nanti kalau sudah jadi gedung perpustakaan, kita akan bekerjasama dengan perguruan tinggi, sekolah, masyarakat, untuk meningkatkan kunjungan," tuturnya.

Dikatakan Ismat, jika tahun ini usulan pembangunan perpustakaan disetujui oleh Perpusnas, kemungkinan pembangunan gedung bisa dilakukan di tahun depan. ● pra

Bencana Pergerakan Tanah di Cikulur, Warga Waswas dan Tidak Bisa Tidur

LEBAK (IM)- Warga di Kampung Margamulya, Desa Gigoong Utara, Kecamatan Gikultur, Kabupaten Lebak merasa waswas dengan adanya ancaman pergerakan tanah yang melanda kampung mereka. Warga yang rumahnya rusak akibat pergerakan tanah mengaku tidak bisa tidur nyenyak saat malam hari. Mereka khawatir pergerakan tanah bisa terjadi kapan pun dan bisa merobohkan rumah.

Marni, warga Kampung Margamulya, sangat khawatir rumahnya yang sudah rusak akan ambruk dan menimpa dirinya bersama anak dan suami. "Jadi kalo malam itu takut, jadi waswas juga. Jadi takut tiba-

tiba roboh ya," ucap Marni, Selasa (10/1).

Kata Marni, rumahnya sudah rusak sejak pergerakan tanah di kampungnya terjadi pada Desember 2022 lalu. Kini rumahnya rusak. Bagian dinding dan keramik sudah retak.

Kekhawatiran Marni semakin bertambah jika hujan melanda kampungnya. Saat hujan biasanya pergerakan tanah semakin parah. Ia bersama keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah orang tua. "Kalau aktivitas sehari-hari mungkin bisa di rumah, cuma kalau tidur, apalagi pas hujan itu di rumah orang tua. Kita cari tempat yang aman buat keluarga," katanya. ● pra



IDN/ANTARA

BUDIDAYA MAGGOT UNTUK KEBUTUHAN PAKAN TERNAK

Pekerja memanen maggot dari sampah organik di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Abu and Co di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (10/1). Dalam satu hari TPST ini mampu menghasilkan 240 kg maggot untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak di wilayah Tangerang Selatan dan Bogor.



IDN/ANTARA

TPA JOMBANG HASILKAN KOMPOS 1,5 TON

Operator mengurai sampah organik yang sudah diolah menjadi pupuk kompos menggunakan mesin windrow turner di Tempat Pembenangan Akhir (TPA) Banjardowo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (10/1). Dari 125 ton sampah per hari di TPA Banjardowo, baru sekitar tujuh persen diantaranya yang bisa diolah menjadi pupuk kompos dan menghasilkan pupuk sebanyak 1,5 ton.

Kenaikan Tarif Tol Tangerang-Merak, Tidak Sesuai Standar Pelayanan

TANGERANG (IM)- Kenaikan tarif Tol Tangerang-Merak telah resmi diberlakukan sejak 3 Januari 2023, lalu. Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aprindo) Banten, Syaiful Bahri menyatakan telah menolak kenaikan tarif ini sejak awal.

Menurutnya, kualitas pelayanan dari Tol Tangerang-Merak masih banyak yang belum memenuhi standar pelayanan sehingga belum layak untuk menaikkan tarif. "Dari awal kami Aprindo tidak setuju kenaikan tarif tol setiap 2 tahun, karena SPM-nya (Standar Pelayanan Minimal) masih belum dipenuhi," tegasnya seperti dikutip, Selasa (10/1).

Syaiful menyebut, kemacetan masih kerap terjadi di Tol Tangerang-Merak lantaran lambatnya pengerjaan dari perluasan dan penambahan jalan tol. Selain itu, masih banyak terjadi pencurian, serta kurangnya rambu-rambu jalan.

"Bahkan, hampir setiap minggu ada kecelakaan di Tol Tangerang-Merak. Itu menandakan masih belum terpenuhinya standar pelayanan yang sudah diatur," katanya. Sementara itu, menanggapi kritikan dari berbagai pihak, Astra Infra Tol Tangerang-Merak selaku pengelola mengaku menerimanya sebagai dorongan untuk kedepannya menjadi lebih baik. Hal itu dikatakan oleh Kepala Departemen Corporate Social Responsibility (CSR) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Astra Tol Tangerang-Merak Uswatun Hasanah.

"Pada prinsipnya kami sangat terbuka terhadap kritik yang membangun, karena akan memacu kami untuk memberikan pelayanan lebih baik ke depannya," ucap Uswatun Hasanah. Pihaknya akan segera menindaklanjuti kritik dan masukan yang dilayangkan, termasuk mengenai percepatan pembangunan di jalan Tol Tangerang-Merak. Hasanah pun meminta kerjasama dengan seluruh pihak-pihak terkait termasuk pengguna jalan, untuk bersama-sama menjaga kualitas tol tetap dalam kondisi yang baik. "Kami juga berharap kerjasama untuk sama-sama menjaga fasilitas publik jalan tol ini agar tetap terjaga kualitasnya," tuturnya. ● pra